

Membendung Kampanye Negatif Melalui Media Sosial

Di era kemajuan teknologi sekarang ini, media sosial (medsos) menjadi alternatif populer di kalangan tim sukses sebagai sarana kampanye untuk mengumpulkan massa. Tetapi tidak jarang dalam kampanye di medsos mengandung provokasi, pencemaran nama baik, pernyataan yang bersifat fitnah dan menyinggung unsur SARA, hal ini bisa disebut sebagai kampanye negatif melalui medsos. Bahkan Presiden Joko Widodo prihatin dengan kondisi media sosial pada saat ini (kompas.com, 13/11/16).

Media Sosial dan Peran Pemerintah

Seiring dengan perkembangan jaman, kampanye tak lagi didominasi dengan cara-cara konvensional. Kampanye dengan pengerahan massa di jalan sudah tidak efektif dan cenderung mahal. Kampanye melalui medsos mempunyai banyak manfaat positif dimana masyarakat dapat melihat visi, misi, dan program kerja setiap calon kandidat serta dapat diakses dengan mudah. Termasuk dapat mengurangi kampanye dengan penggalangan massa di jalan yang menimbulkan kemacetan maupun kebisingan di jalan.

Disamping sisi positif, keberadaan media sosial juga memunculkan beberapa fenomena negatif. Unsur negatif media sosial diantaranya adalah informasi dapat diakses dari segala umur dan tidak ada filter yang tangguh untuk menyaring arus informasi. Apabila terdapat golongan yang belum mampu merespon isu dengan jernih, dapat memunculkan perpecahan di masyarakat. Perseteruan kampanye yang saling menjelek-jelekan antar calon juga dapat memunculkan apatisme politik di masyarakat, sehingga akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintahan selanjutnya.

Informasi merupakan barang publik dan kebebasan berpendapat dijamin di Indonesia, tetapi jika kebebasan berpendapat tersebut sudah meresahkan masyarakat dan cenderung mengancam keutuhan bangsa, maka pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan demi terciptanya ketenteraman di masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator dapat melakukan tindakan konkrit melalui pembuatan peraturan dan penegakan hukum. Regulasi yang ada diharapkan dapat mengantisipasi laju perkembangan teknologi sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik, di samping itu masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan pengetahuan sebagai bentuk pencegahan terhadap kampanye negatif.

Contoh regulasi yang dibuat oleh pemerintah misalnya yang diberlakukan KPU terkait kampanye di medsos, yaitu pendaftaran akun medsos pasangan paling lambat satu hari sebelum masa kampanye, pengisian formulir terkait akun medsos yang digunakan, dan tidak boleh menyebarkan isu SARA atau membangkitkan sentimen rasial. Pemerintah juga sudah mempunyai UU ITE sehingga dapat digunakan terhadap akun yang tidak terdaftar yang melakukan kampanye negatif sebagai bentuk *cyber crime*. Walaupun begitu, masih terdapat keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan dan pengawasan di medsos dikarenakan luasnya dunia maya dan berbagai macam jenis medsos.

Membendung Kampanye Negatif Melalui Media Sosial

Kampanye negatif di medsos memang sulit dibendung dikarenakan kegiatan tersebut beroperasi di dunia maya. Sulitnya pembuktian, karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan disebarkan dalam hitungan detik, serta tidak ada masa tenang kampanye di medsos.

Untuk itu selain aturan - aturan yang jelas mengatur kampanye di medsos, perlu ada pengelolaan yang tepat terhadap resiko - resiko dari dampak negatif medsos terutama terkait dengan penanganan bila terjadi pelanggaran, dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dibidang teknologi informasi. Pemerintah juga perlu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengawasi konten yang ada di medsos. Kesadaran dan kemampuan memfilter informasi pengguna medsos menjadi poin yang sangat penting dalam membendung kampanye negatif melalui medsos yang bisa ditingkatkan melalui berbagai bentuk edukasi.

